

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali. (2001). Tujuan dan Fungsi Hukum. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Asikin, A. &. (2006). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Atmasasmita, R. (2010). Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. Jakarta: Kencana.
- Buaton, T. (2016). Peradilan Militer di Indonesia di Bawah Kekuasaan Mahkamah Agung. Jakarta: Pustaka Kemang.
- Effendi, T. (2013). Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Harahap, M. Y. (2009). Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kurniatmanto, S. (1994). Pemerintahan dan Peradilan di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mamudji, S. S. (2003). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Maringka, J. S. (2017). Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, Sudikno, 2009. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Mulyana, Asep N. dkk, (2020). Mandat Konstitusional Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer. Depok: Rajawali Pers.

- Reksodiputro, Mardjono, 1997. Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta.
- Salam, M. Faisal. (2006). Hukum Pidana Militer di Indonesia. Bandung: Penerbit Mandar Maju
- Soekanto, S. (2005). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI - Press.
- Soekanto, S. (2019). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI - Press.
- Soeptoawiro, Kurniatmanto. (1994). Pemerintahan dan Peradilan di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Surono, A. (2013). Fiksi Hukum Dalam Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan, Jakarta: Perpustakaan Nasional.

Jurnal

- Handar Subhandi Bakhtiar, 2022. “*Pentingnya Bukti Forensik Pada Pembuktian Tindak Pidana.*” Jurnal Hukum Pidana&Kriminologi, Vol. 03.
- Indonesia Badan Pembinaan Hukum Nasional. (1996) *Analisis dan evaluasi hukum tentang putusan pengadilan militer dalam perkara koneksitas* (Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman)
- Muh. Ibnu Fajar Rahim, 2023. “*Asas-Asas Hukum Penuntutan: The Legal Principles Of Prosecution*”, The Prosecutor Law Review, Vol. 1, No. 1, 2023.
- Soniardhi. (2017). *Kewenangan Anklam Terhadap Tawanan Perang Dalam Hukum Disiplin Militer.* Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) 6, no. 4.
- Widodo, T. (2018). *Gugatan Pihak Ketiga Terhadap Eksekusi Barang Sitaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.* Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) 7, no. 2.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara/Militer

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

Internet

Antaraneews, “*Jampidmil membentuk satgas percepat penanganan perkara koneksitas*”, <https://www.antaraneews.com/berita/3373572/jampidmil-membentuk-satgas-percepat-penanganan-perkara-koneksitas>, dikunjungi pada Kamis 28 Maret 2024 pukul 16.29 WIB.

Basel Institute of Governance, “*Guideline 8: Parallel Investigation*”,
<https://learn.baselgovernance.org/mod/page/view.php?id=884>, dikunjungi
pada Kamis, 28 Maret 2024, pukul 10.00 WIB.

Hukumonline.com, *Reformulasi Keberadaan Peradilan Militer di Indonesia*,
diakses dari:
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5b1dff26e1e66/reformulasi-keberadaan-peradilan-militer-di-indonesia>, dikunjungi pada Rabu, 27 Maret
2024, pukul 10.19 WIB.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia: Direktorat
Jenderal Peraturan Perundang-undangan, “*Urgensi Koneksitas &
Penanganan Perkara Koneksitas*”,
https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=5754:urgensi-koneksitas-penanganan-perkara-koneksitas&catid=268:kegiatan-djpp&Itemid=73&lang=en, dikunjungi pada
Rabu, 27 Maret 2024, pukul 12.30 WIB.

Rudi Pradisetia Sudirdja, “*Satu Komando Penuntutan Untuk Sipil Dan Militer*”,
<https://pji.kejaksaan.go.id/index.php/home/berita/877>, dikunjungi pada Rabu
27 Maret 2024 pukul 16.00 WIB.

SIPPN: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia, “*Mengenal Sekilas tentang Pidana Bersyarat*”,
<https://sippn.menpan.go.id/berita/54006/rumah-tahanan-negara-kelas-iib-pelaihari/mengenal-sekilas-tentang-pidana-bersyarat>, dikunjungi pada Jumat
29 Maret 2024 pukul 17.00 WIB.

Dokumen/Makalah

Mulyana, Asep N., 2021. “*Jampidmil sebagai Upaya Adaptif dan Inovatif
menghadapi Tuntutan Perkembangan Penegakan Hukum dalam Penanganan
Perkara Koneksitas*”, Bahan Hukum dalam Rakorniskum Tahun Anggaran
2021.

Amabel Shahab Maleakhi Panjaitan, 2024
**ANALISIS YURIDIS PERAN DAN KEDUDUKAN JAKSA AGUNG MUDA BIDANG
PIDANA MILITER DALAM PERKARA KONEKSITAS**
UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Magister Hukum
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

Tim Pengajar pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer, 2023. “*Penanganan Perkara Koneksitas*”, Bahan Hukum.